

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jambi merupakan salah satu provinsi di pulau Sumatra. Salah satu penduduk yang menghuni provinsi Jambi adalah Suku Anak Dalam (SAD) atau yang biasa disebut dengan Orang Rimba merupakan salah satu suku minoritas yang tersebar di Pulau Sumatra, tepatnya di Provinsi Jambi dan Sumatra Selatan. SAD memiliki pola hidup yang bergantung dengan sumber daya hutan. SAD hidup dengan cara berburu, mengumpulkan, dan meramu, walaupun di antara SAD sudah banyak yang telah memiliki lahan karet, sawit ataupun pertanian lainnya. Suku Anak Dalam hidup di 3 wilayah ekologis yang berbeda, yaitu wilayah Utara Provinsi Jambi (Sekitar Taman Nasional Bukit 30), Taman Nasional Bukit Duabelas, dan wilayah Selatan Provinsi Jambi. Mereka hidup di wilayah administrasi Merangin, Sarolangun, Batang Hari, Tanjung Jabung Barat, Tebo dan Bungo (BPS, 2021).

Suku Anak Dalam termasuk kedalam Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang ada di Provinsi Jambi. Kehidupan mereka mengambil posisi yang berkebalikan dengan masyarakat luar pada umumnya. SAD hidup berpindah-pindah (nomaden), terutama saat ada kematian. Suku Anak Dalam (SAD) atau Suku Kubu atau “Anak Rimba” merupakan salah satu suku terasing (sekarang dikenal dengan sebutan Komunitas Adat Terpencil/KAT) yang ada di Provinsi Jambi. Sebutan Suku Anak Dalam (SAD) dipopulerkan oleh Departemen Sosial pada tahun 1970, dengan tujuan untuk membedakan mereka dengan masyarakat luar yang disebut orang terang (Hartono, 2010).

Suku Anak Dalam (SAD) atau yang disebut sebagai Orang Rimba terbesar berada di Kabupaten Sarolangun yang tersebar di 5 kecamatan dan 10 desa dengan populasi 1.093 jiwa. Kedua di Kabupaten Merangin dengan populasi 865 jiwa, yang tersebar di 13 kecamatan dan 19 desa. Diikuti dengan Kabupaten Tebo dengan populasi Orang Rimba 822 jiwa dan tersebar di 8 kecamatan dan 10 desa. Wilayah persebaran Orang Rimba lainnya berada di Kabupaten Bungo dengan populasi 289 jiwa yang tersebar di 7 kecamatan dan 8 desa. Selanjutnya di wilayah Kabupaten Batang Hari, yaitu tersebar di 2 kecamatan dan 2 desa dengan populasi 79 jiwa. Dan wilayah persebaran dengan populasi terkecil terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan populasi 57 jiwa yang tersebar di 2 kecamatan dan 2 desa.

Berdasarkan survey Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (KKI-Warsi) pada tahun 2010, populasi Suku Anak Dalam terbesar berada di Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD). Data dari Balai Taman Nasional Bukit Duabelas pada Maret tahun 2018 populasi SAD yang tersebar di kawasan Taman Nasional sebanyak 2.960 jiwa yang terdiri dari 718 Kepala Keluarga. Suku Anak Dalam yang tersebar di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas ini terdiri dari 13 Temenggung, meliputi 3 kabupaten: Kabupaten Batanghari, Tebo dan Kabupaten Sarolangun (Balai TNBD, 2018).

Berikut adalah data persebaran SAD berdasarkan wilayah administratif Kabupaten/kota di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Persebaran Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi Berdasarkan Wilayah Sebaran Pada Tahun 2020

Tumenggung	Wilayah	KK
Sarolangun		328
Bebayang	Air Hitam	27
Melayau tua	Air Hitam	45
Bepayung	Air Hitam	26
Afrizal	Air Hitam	24
Nangkus	Air Hitam	101
Ngrip	Air Hitam	105
Batanghari		331
Nyenong	Serengam/Batin XXIV	35
Nyurau	Sungai Terap/ Batin XXIV	79
Ngamal	Sei. Sakolado/ Batin XXIV	28
Girang	Kejasung Kecil/ Batin XXIV	27
Jelitai	Muaro Sebo Ulu	142
Nyogan	Batanghari	40
Tebo		101
Ngadap	Tanah Garo	101
Muaro jambi		45
Celitai	Mekar Jaya	45
Merangin		108
Ngepas	Gading Jaya	15
Sikar	Mentawak	33
Pakjang	Sungai Ulak	23
Tampung	Sungai Ulak	12
Joni	Mentawak	25
Muaro bungo		39
Hari/Badai	Rantau Kelayang	39
Jumlah		932

Sumber: Data Bansos Yayasan Prakarsa Madani 2020

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa Kabupaten Sarolangun merupakan kabupaten yang menjadi persebaran SAD terbesar kedua setelah Batanghari. Persebaran kelompok Suku Anak Dalam berdasarkan wilayah persebarannya yaitu Kabupaten Sarolangun terdapat 6 kelompok dengan jumlah 328 KK, Kabupaten Batanghari terdapat 6 kelompok dengan jumlah 331 KK, Kabupaten Tebo terdapat 1 kelompok dengan jumlah 101 KK, Kabupaten Muaro Jambi terdapat 1 kelompok dengan jumlah 45 KK, Kabupaten Merangin terdapat

5 kelompok dengan jumlah 108 KK, dan Kabupaten Muaro Bungo terdapat 1 kelompok dengan jumlah 39 KK.

Berikut ini adalah data mengenai jumlah kepala keluarga berdasarkan kelompok Temenggung Suku Anak Dalam SAD di Kecamatan Air Hitam pada Tabel 2.

Tabel 2. Populasi Suku Anak Dalam di Kecamatan Air Hitam Pada Tahun 2020

Desa	Temenggung	Jumlah KK
Lubuk Jering	Bebayang	27
	Melayau Tua	45
Pematang Kabau	Bepayung	26
	Nangkus	101
	Afrizal	24
Bukit Suban	Ngrip	105
Jumlah		328

Sumber: Data Bansos Yayasan Prakarsa Madani 2020

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah SAD terbanyak tergabung dalam wilayah Desa Lubuk Jering adalah kelompok Temenggung Melayau Tua dengan warga sebanyak 72 KK. Kemudian yang tergabung dalam wilayah Pematang Kabau dengan jumlah SAD terbanyak adalah kelompok Temenggung Nangkus sebanyak 151 KK. Kemudian untuk Desa Bukit Suban terdapat kelompok Temenggung Ngrip sebanyak 105 KK.

Suku Anak Dalam atau Orang Rimba yang tersebar di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas dalam mencari sumber kehidupannya dibagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan karakteristiknya. Pertama, SAD yang masih berada dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas atau biasa disebut Suku Anak Dalam Dalam. Suku Anak Dalam Dalam ini masih menggantungkan hidupnya kepada sumber daya hutan dengan cara berburu, mengumpulkan dan meramu. Kedua, SAD

yang berkelana yaitu membuat tempat tinggal sementara (sudung) di areal perkebunan kelapa sawit milik masyarakat desa. Ketiga, SAD yang menetap yaitu SAD yang telah mempunyai rumah dan hidup layaknya masyarakat desa.

Berdasarkan demografi SAD dalam Taman Bukit Duabelas 2018, pola hidup SAD saat ini telah mengalami pergeseran ke arah pertanian menetap yaitu dengan memiliki kebun karet maupun sawit. Hal ini pula yang menjadi salah satu penyebab periode melangun atau berpindah menjadi pendek, yaitu ladang yang di budidayakan tidak hanya berupa tanaman semusim sehingga timbul kekhawatiran jika di tinggalkan lebih lama ladang-ladang tersebut rusak. Bagi SAD yang tinggal di dalam kawasan, aktifitas berburu dan meramu saat ini tidak menjadi sumber penghasilan utama dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Menurut Demografi SAD Taman Bukit Duabelas tahun 2018, gaya hidup SAD saat ini telah beralih ke pertanian menetap yaitu memiliki perkebunan karet dan kelapa sawit. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab pendeknya masa peralihan, yakni lahan garapan tidak hanya berupa tanaman semusim, sehingga dikhawatirkan lahan-lahan tersebut akan musnah jika dibiarkan lebih lama. Bagi SAD yang tinggal di kawasan tersebut, berburu dan meramu saat ini bukan merupakan sumber pendapatan utama untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena pergeseran pola hidup inilah masyarakat SAD yang sebelumnya bergantung pada hutan, saat ini telah bergantung dengan hasil kebun seperti karet dan kelapa sawit.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, adapun pola hidup SAD yang telah beralih menjadi menetap/bermukim seperti masyarakat desa, mereka hidup dan memiliki berbagai jenis pekerjaan. Sebagian besar SAD yang menetap

mencari nafkah dengan berkebun sesuai adatnya, namun sebagian lagi bekerja sebagai petani. Beberapa dari mereka dapat menjadi sukses, tetapi beberapa memiliki kehidupan yang sangat terbatas. Dengan memiliki perkebunan karet atau kelapa sawit, gaya hidup SAD beralih ke pertanian menetap sehingga makanan pokok sehari-hari mereka sama dengan masyarakat pada umumnya. Makanan dibeli dengan uang hasil penjualan getah karet dan biji aren.

Berbagai kendala yang dialami SAD, maka diperlukan adanya peran pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan SAD. SAD merupakan bagian dari beberapa komunitas yang tersebar di hutan Jambi, salah satunya SAD di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun. SAD memiliki komunitas yang kecil, tertutup, homogen, hubungan sosialnya hanya dengan kerabat, hidup terpencil, sulit dijangkau, menggunakan peralatan sederhana, ketergantungan pada alam sangat tinggi, serta terbatas dalam mendapatkan layanan sosial, ekonomi, dan politik. Sehingga layanan pemerintah desa juga harus sampai pada masyarakat SAD.

Pelayanan publik ialah perihal kemudahan yang diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan barang dan jasa. Dalam prakteknya di pemerintahan, negara berkewajiban melayani dalam pengertian memberikan pelayanan publik kepada setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Sehingga layanan publik juga dilakukan oleh pemerintah desa yang memberikan berbagai kegiatan layanan kepada masyarakat.

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi

itu sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan. Pemerintahan pada hakikatnya adalah pemberi layanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang membuat setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan Bersama. Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan layanan baik dan professional kepada masyarakat. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. Untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik diperlukan suatu standar dalam memberikan pelayanan publik (Rahmadana, 2020).

Pemerintah desa dalam melakukan program pada masyarakat akan mendapati kendala di lapangan maupun dalam tahap perencanaan, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup keseluruhan kehidupan yang dapat dikendalikan baik oleh pemimpin maupun oleh anggota dalam kelompok masyarakat yang bersangkutan, seperti: kebiasaan, ketergantungan dan rasa tidak percaya diri. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kelompok masyarakat tersebut antara lain: kebijakan pemerintah, sosio-budaya masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang belum mampu diikuti oleh SAD.

Sikap masyarakat terhadap kualitas kegiatan layanan sosial pemerintah desa akan menjadi faktor yang sangat menentukan terhadap keberhasilan kegiatan program pengembangan desa tersebut. Sikap hanya dapat ditunjukkan pada perilaku yang nampak. Sikap diikuti dengan kecenderungan untuk melakukan

tindakan sesuai dengan objek, baik berupa dukungan maupun perasaan tidak mendukung (Kusrini, 2018). Sarana pelayanan semakin dituntut untuk lebih lengkap, modern dan canggih seiring dengan perkembangan teknologi, karena sudah menjadi keinginan masyarakat sebagai customer dari birokrasi untuk mendapat pelayanan yang lebih cepat dan akurat (Nurdin, 2019). Dengan demikian, perlu diketahui sikap masyarakat terhadap kegiatan layanan pemerintah untuk dapat melihat keberhasilan program pemerintah.

Kegiatan layanan sosial dalam penelitian ini mencakup pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, sosial, pendidikan, dan politik. Layanan administrasi kependudukan adalah pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), layanan kesehatan adalah pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS), layanan sosial adalah pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), layanan pendidikan adalah pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan layanan politik adalah partisipasi dalam pemilu.

Berikut ini adalah data layanan sosial pemerintah yang diperoleh oleh Suku Anak Dalam SAD di Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam yang dapat dilihat pada Tabel 3:

Tabel 3. Pelayanan Pemerintah SAD di Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Pada Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan	Telah Memiliki (KK)	Persentase (%)	Belum Memiliki (KK)	Persentase (%)
1	KTP	68	65	37	35
2	KK	47	45	58	55
3	BNPT	57	54	48	46
4	PKH	13	12	92	88
5	KIS	39	37	66	63
6	KIP	6	6	99	94

Sumber: Data Kantor Desa Bukit Suban 2022

Tabel 3 menunjukkan bahwa masyarakat SAD telah mendapatkan pelayanan sosial di Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam. Pelayanan pemerintah di Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam yang dilakukan adalah pembuatan dan pemberian KTP, KK, BPNT, PKH, KIS, dan KIP. Meskipun telah terdapat masyarakat SAD yang mendapatkan berbagai layanan dari pemerintah, sebagian besar masyarakat SAD masih belum mendapatkan pelayanan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal pemerintah Desa Bukit Suban bahwa telah ada layanan sosial yang disediakan pemerintah desa. Masyarakat SAD telah bersedia turut serta dalam pembuatan KTP dan KK, sehingga jika ada bantuan maka masyarakat SAD juga akan diberikan. Bagi yang tidak memiliki atau belum memiliki KTP tetap akan mendapat bantuan berupa beras yang diberikan langsung oleh pemerintah desa. Identitas penduduk sangat penting bagi SAD karena dengan adanya identitas kependudukan mereka dapat ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang diadakan setiap lima tahun sekali, SAD dapat menentukan kepala daerah mereka setelah menyumbangkan hak suaranya dalam pemilihan umum.

Pada layanan sosial/ekonomi, penerima bantuan berupa sembako yang diperoleh dari pemerintah daerah atau dari perusahaan yang umumnya mendapat bantuan dari PT.SAL. Terdapat 88% masyarakat SAD memperoleh PKH dan 46% telah mendapatkan BNPT. Namun, masih banyak pula masyarakat SAD yang belum mendapatkan bantuan PKH atau BNPT. Hal ini dapat terjadi akibat kesalahan teknis sehingga masyarakat SAD tidak memperoleh dana bantuan tersebut. Masih ada masyarakat SAD yang telah mendapatkan kartu, namun tidak bisa diproses untuk mendapatkan bantuan atau dana tidak bisa dicairkan.

Pada layanan kesehatan, masyarakat SAD mendapat layanan dari puskesmas, yaitu berupa KIS. Terdapat 37% masyarakat SAD telah mendapatkan bantuan KIS. Artinya, masih banyak masyarakat SAD yang belum mendapatkan bantuan akses kesehatan seperti KIS tersebut. Hal ini dapat terjadi dikarenakan KIS hanya dapat digunakan secara bersama atau dapat digunakan orang yang berbeda asalkan masih sesama SAD. Sehingga, masyarakat SAD berpikir untuk tidak perlu repot-repot mengurus KIS selagi masih dapat menggunakan kartu KIS secara bersama.

Pada layanan pendidikan telah diberikan berupa pendirian sekolah, yaitu 2 PAUD, 3 TK, 3 SD, 1 SMP dan 1 SMK. Untuk program khusus pendidikan tidak ada, namun ada bantuan KIP untuk SAD dan masyarakat kurang mampu. Hanya terdapat 6% masyarakat SAD yang telah menerima bantuan KIP. Masih kurangnya bantuan KIP kepada masyarakat SAD dikarenakan sistem atau cara untuk mendapatkannya bergiliran dan mengandalkan bantuan pendidikan tersebut dari PT. SAL.

Masyarakat SAD masih mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Hal ini disebabkan karena beberapa perbedaan norma, adat serta bahasanya. Mereka masih kurang percaya diri untuk berinteraksi dengan masyarakat lain sehingga mereka jarang mengikuti kegiatan sosial di lingkungannya. Hanya sebagian kecil masyarakat SAD mulai mau menggunakan layanan-layanan sosial pemerintah desa. Pemerintah desa telah berupaya dalam melakukan kegiatan desa termasuk pada masyarakat SAD, akan tetapi program tersebut belum mencapai hasil yang optimal. Dari berbagai bantuan yang diterima

SAD, pemerintah Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam sampai saat ini memang belum memiliki program khusus ataupun rencana program berkelanjutan untuk pemberdayaan SAD di Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam itu sendiri. Sehingga dalam hal ini peran pemerintah Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam hanya sebagai penyalur bantuan dari luar desa, baik bantuan dari dinas sosial ataupun dari perusahaan.

Berdasarkan penuturan kepala Temanggung yang mengungkapkan bahwa masyarakat desa Bukit Suban juga masih banyak yang belum menempuh proses pendidikan, sehingga tingkat pengetahuan masyarakat masih rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya kemauan dan pemahaman masyarakat SAD terkait pentingnya pendidikan bagi masa depan sehingga membuat masyarakat enggan untuk bersekolah. Serta kurangnya sosialisasi dan pendekatan ke masyarakat SAD terkait pentingnya pendidikan. Perlu adanya proses pendekatan ke masyarakat SAD desa Bukit Suban agar mereka mau mengikuti kegiatan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pemberdayaan SAD dengan mengangkat judul penelitian **“Sikap Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Terhadap Kualitas Kegiatan layanan sosial di Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun”**.

1.1 Rumusan Masalah

Suku Anak Dalam (SAD) merupakan satu suku bangsa minoritas dan merupakan Komunitas Adat Terpencil di Jambi. SAD memiliki gaya hidup dan

kepercayaan yang unik dan berbeda dengan kehidupan masyarakat umumnya. SAD hidup berkelompok dan sangat bergantung dengan hutan. Berbagai pandangan terhadap SAD bermunculan dari orang-orang yang pernah berinteraksi dengan SAD, bahkan masyarakat yang tinggal didekat mereka tinggal (masyarakat transmigrasi), mempunyai pandangan bahwa SAD itu merupakan masyarakat yang masih sangat tertinggal hingga kurang bersih. Suku Anak Dalam merupakan salah satu komunitas adat terpencil di Provinsi Jambi yang hidupnya masih terbelakang karena menempati daerah-daerah pedalaman seperti di hutan-hutan yang sulit terjangkau oleh layanan pemerintah atau institusi lain.

Meskipun sekarang telah mengalami kemajuan, karena kebiasaannya yang suka hidup terisolasi dari kehidupan dunia luar mengakibatkan rendahnya tingkat kebudayaan dan peradaban dari mereka menjadi cukup terbuka. Sifat ketergantungan ekonomi Suku Anak Dalam terhadap hutan masih sangat tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan SAD menjadi tertinggal dari kehidupan masyarakat desa pada umumnya sehingga kehidupan SAD juga rendah.

Dalam upaya pengoptimalan pelaksanaan kegiatan layanan masyarakat desa termasuk masyarakat SAD maka dibutuhkan peran dan juga kesungguhan dari pemerintah menjadi hal penting untuk dapat membantu dalam proses memandirikan SAD. Selain itu terjalinnya komunikasi yang baik dan melibatkan SAD secara partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat dijadikan solusi untuk meminimalisir kegagalan program pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sikap masyarakat SAD terhadap kualitas kegiatan layanan sosial di Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun?
2. Bagaimana kualitas kegiatan layanan sosial di Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun?
3. Bagaimana hubungan sikap masyarakat SAD terhadap kualitas kegiatan layanan sosial di Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui sikap masyarakat SAD terhadap kualitas kegiatan layanan sosial di Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.
2. Mengetahui kualitas kegiatan layanan sosial di Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.
3. Mengetahui hubungan sikap masyarakat SAD terhadap kualitas kegiatan layanan sosial di Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Sebagai bahan informasi terkait hubungan sikap masyarakat SAD terhadap kualitas kegiatan layanan sosial di Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.
2. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam dalam menyusun kebijakan kualitas kegiatan layanan pemerintah, khususnya untuk masyarakat SAD.
3. Sebagai referensi dan rujukan bagi penelitian relavan yang juga melakukan penelitian terkait sikap masyarakat terhadap kualitas kegiatan layanan pemerintah desa, khususnya masyarakat Suku Anak Dalam (SAD).